



# KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450  
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

---

Nomor: 02/Siaran Pers/AL/LI.04.01/1/2019

**UNTUK DITERBITKAN SEGERA**

Jakarta, 10 Januari 2019

## **KY Usulkan Empat Calon Hakim Agung ke DPR**

**Jakarta (Komisi Yudisial)** – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan empat nama calon hakim agung (CHA) 2018 ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Kamis (10/1) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Penetapan kelulusan CHA 2018 ini dilakukan melalui rapat pleno KY, Selasa (8/1). Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

KY menetapkan empat CHA dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, yaitu: Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji di kamar Perdata, Cholidul Azhar di kamar Agama, dan Sartono di kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak.

Sekadar informasi, seleksi CHA ini untuk mengisi 8 orang hakim agung dengan rincian: 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

Ketua Komisi Yudisial  
**Jaja Ahmad Jayus**

Untuk informasi lebih lanjut:  
**Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY**  
Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat  
(021) 3906189  
[humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)  
[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

# KY USULKAN EMPAT CHA KE DPR

8

## Jumlah Kebutuhan

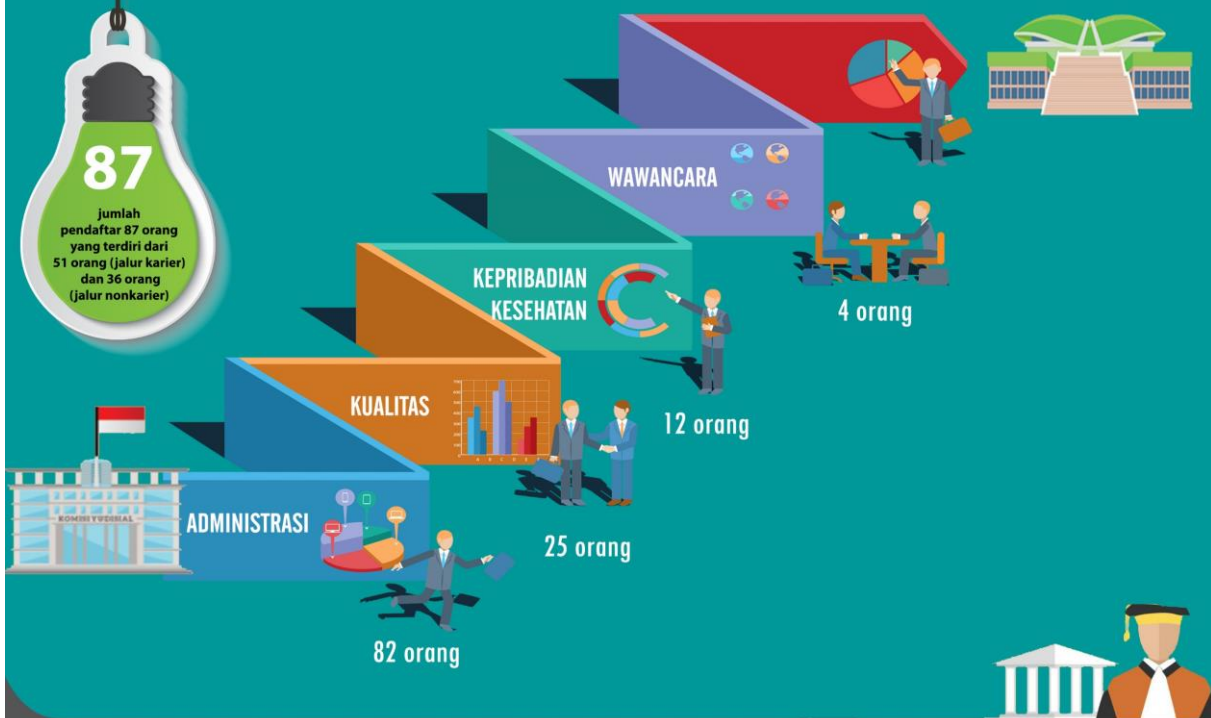
- 1 Kamar Agama
- 2 Kamar Militer
- 3 Kamar Perdata
- 1 Kamar TUN
- 1 Kamar Pidana



Agustus 2018, KY kembali membuka penerimaan usulan CHA sebanyak 8 orang, yaitu 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

87

jumlah pendaftar 87 orang yang terdiri dari 51 orang (jalur karier) dan 36 orang (jalur nonkarier)





## PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019. Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 4 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Adapun calon hakim agung tahun 2018 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:



**Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**

Lahat, 11 November 1959  
Profesi : Hakim  
Pendidikan Terakhir : S3  
Bidang Kompetensi : Perdata  
Riwayat Pendidikan :  
- 1985: S1 Ilmu Hukum  
Universitas Sriwijaya Palembang  
- 2003: Magister Ilmu Hukum  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business  
Law and Legal Management Jakarta  
- 2009: Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Padjadjaran Bandung

**Matheus Samiaji, S.H., M.H.**

Boyolali, 1 September 1957  
Profesi : Hakim  
Pendidikan Terakhir : S2  
Bidang Kompetensi : Perdata  
Riwayat Pendidikan :  
- 1986: S1 Ilmu Hukum  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
- 2003: Magister Hukum  
Uninersitas Negeri Surakarta Sebelas Maret



**H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.**

Malang, 13 Maret 1954  
Profesi : Hakim  
Pendidikan Terakhir : S2  
Bidang Kompetensi : Agama  
Riwayat Pendidikan :  
- 1991: S1 Hukum  
Universitas Darul Ulum Jombang  
- 2005: Magister Hukum  
Universitas Brawijaya, Malang

**Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.**

Singawang, 14 Februari 1953  
Profesi : Hakim Pajak  
Pendidikan Terakhir : S3  
Bidang Kompetensi : Tata Usaha Negara  
Riwayat Pendidikan :  
- 1989: S1 Hukum  
Universitas Pancabhakti Pontianak  
- 2000: Magister FISIP  
Universitas Padjadjaran  
- 2012: Magister Hukum  
Universitas Indonesia  
- 2015: Doktor Hukum  
Universitas Jayabaya

